

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Dwiyanto, DKK. 2007. *Government Assessment Survey: Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet. 1. Yogyakarta: Cengkir Gading
- Alif Ilman Mansyur, *et.al.* (2022). *Pendidikan Antikorupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Anti Korupsi)*. Bandung: Widiana Bhakti Persada
- Aminuddin Ilmar. 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR. 2020. Buletin BPIW Sinergi Edisi 47: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Sektor PUPR, Jakarta: BPIW Kementerian PUPR
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. (2020). *Buletin BPIW Sinergi Edisi 47: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Sektor PUPR*. hlm. 39.
- Bank Indonesia. (2022). Analisis Perkembangan Uang Beredar. Jakarta: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/M2-Januari-2022.aspx>
- BPKP. (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Puslitbang BPKP
- James Patrick Chaplin. (2009). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dunn William. 1998. *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan. *Ketahanan Nasional Untuk Bela Negara*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan Tambayong, Namora Y, Wajdi AF. (2022). *Indeks Pertahanan Wilayah Kalimantan: Analisis Pertahanan Wilayah di Kalimantan Pembangunan Ibu*

Cahya Hardianto Harefa, 2024

PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI KORUPSI PEMBANGUNAN IBU KOTA 91 NUSANTARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Kota Negara. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pertahanan RI.
- Kartono, dkk. (2000). *Kamus Psikologi*, Bandung: Pionir Jaya
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Jakarta: Bappenas
- Kemendikbud. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Paparan Laporan Mingguan IKN*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi: Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Analisis Kerentanan Risiko Korupsi pada Regulasi Ibu Kota Negara dengan Menggunakan Metode Corruption Risk Assessment (CRA)*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null>
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Fundation
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Bidang Studi: Kewaspadaan Nasional*, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Nasution, Z. (2004). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud MZ. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Riant Nugroho. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex media Komputindo.

Cahya Hardianto Harefa, 2024

PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI KORUPSI PEMBANGUNAN IBU KOTA 92 NUSANTARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Ronald Bojorski. 2017. *Moving Capitals: The Political Geography of State Formation and Separation*. Rowman & Littlefield
- Sedarmayanti. (2007). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siti Zuhro. 2020. *Pemindahan Ibu Kota Negara: Tantangan dan Peluang*, Jakarta: LIPI Press
- Miftah Thoha. (2005). *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Victor MS, Jusuf Juhir. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta Raksasa.
- Zainal Arifin Mochtar. 2020. *Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Zikra Nur Andini. 2021. *Pemindahan Ibu Kota Negara dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Jaya

Jurnal

- Beniharmoni Harefa, Razananda Skandiva. (2022). “Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia”. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 7(2)
- Dian Herdiana. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, Vol. 8(1).
- Hengkelare, S.H. S. (2021). Mitigasi Risiko Bencana Banjir di Manado. *Jurnal Spasial* Vol. 8(2)
- Juanda Nawawi (2009). Membangun kepercayaan dalam Mewujudkan *Good governance*, Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol (2)1.
- Ida Suryani Wijaya. (2015). “Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pembangunan”. *Jurnal Lentera* Vol. XVIII (1).

Cahya Hardianto Harefa, 2024

PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI KORUPSI PEMBANGUNAN IBU KOTA 93 NUSANTARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Luca Mora, M Deaking, Zhang X, *et al.* (2021). Assembling Sustainable Smart City Transitions: An Interdisciplinary Theoretical Perspective. *Journal of Urban Technology*. Vol (28)1-2,1-27
- Marie Terracol. (2015). Corruption Risk Assessment and Management Approaches In The Public Sector. Transparency International
- Muhammad Yahya. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. (14)1.
- Nicodemous R. Toun. (2018). Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. *Jurnal Academia Praja* Vol. 1(1)
- Suryadi Jaya Purnama, Chotib. (2022). Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. Vol 13(2)
- Sita Rani, Mihsra Ram Krishn Mishra, Mohammed Usman, et. al (2021), Amalgamation of Advanced Technologies for Sustainable Development of Smart City Environment: A Review. *IEEE ACCESS*. Vol 9
- Sara Rinfret; Denies Scgeberies; Michelle Pautz, *el. al* (2018). “Chapter 2: The Policy process and Policy Theories”. *Public Policy: A Concise Introduction*, SAGE Publications.

Undang-Undang

- Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu Kota Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengalami beberapa kali perubahan, termasuk menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sumber [online]: diakses pada tanggal 5 Juli 2023
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengalami beberapa kali perubahan, termasuk menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan terakhir menjadi

Cahya Hardianto Harefa, 2024

PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI KORUPSI PEMBANGUNAN IBU KOTA 94 NUSANTARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sumber [online]: diakses pada tanggal 5 Juli 2023

Undang-Undang No.31 Tahun 1999. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sumber [online]: undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [JDIH BPK RI], diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

Berita (Internet)

Firmansyah, M. Pelantikan Batu Pertama IKN, Menteri PUPR: Presiden Tak Suka Seremoni. URL. <https://asumsi.co/post/68006/peletakan-batu-pertama-ikn-menteri-pupr-presiden-tak-suka-seremoni/> akses pada Rabu, 12 Juli 2022, pukul 13.40.

Huda, L. (2023). Siaga Bahaya Gempa Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/30/18012981/siaga-bahaya-gempa-jakarta-setelah-tak-lagi-jadi-ibu-kota?page=all>

Indriani A. 2022. Sumber [Online]: <https://finance.detik.com/properti/d-5930214/alasan-ibu-kota-pindah-rawan-gempa-jakarta-mau-tenggelam>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023.

Ramadhan, AB. *KPK Kawal Pembangunan IKN Jangan Sampai Bocor Karena Korupsi*. <https://news.detik.com/berita/d-5924880/kpk-kawal-pembangunan-ikn-jangan-sampai-bocor-karena-korupsi>. diakses pada tanggal 27 April 2023 jam 13.29 WIB

Suwarso IE. Pengiriman Material Logistik Buat Bangun IKN Terkendala. <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-6587924/pengiriman-material-logistik-buat-bangun-ikn-terkendala>, diakses pada tanggal 05 Juni 2023 jam 15.34 Wib

Utami, SN. (2022). Sumber [Online]: Afrika Selatan, Negara yang Mempunyai 3 Ibu Kota. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/02/03/143552069/afrika-selatan-negara-yang-mempunyai-3-ibu-kota>, akses pada 12 Juli 2023, pukul 13.34

Cahya Hardianto Harefa, 2024

PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI KORUPSI PEMBANGUNAN IBU KOTA 95 NUSANTARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]